



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KPKNL YOGYAKARTA

**DJKN**

Laporan Kinerja

**KPKNL**

**Yogyakarta**

**2024**



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
Perjanjian Kinerja .....	9
Evaluasi Kinerja .....	12
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
Capaian Kinerja Organisasi .....	15
Kinerja Lainnya .....	51
Realisasi Anggaran .....	54
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	55
<b>LAMPIRAN</b>	

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Yogyakarta pada tahun 2024 serta penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2024, KPKNL Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan target perjanjian kinerja tahun 2024, serta pencapaian beberapa kinerja lainnya.

Semoga Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta ini dapat memberikan gambaran atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dihadapi selama tahun 2024 dan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan serta menjadi pendorong peningkatan kinerja KPKNL Yogyakarta.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran pejabat dan staf KPKNL Yogyakarta yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.

Kepala KPKNL Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Tuti Kurniyarningsih



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Yogyakarta atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Yogyakarta, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Yogyakarta selama tahun 2024.

Visi KPKNL Yogyakarta selaras dengan visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai lima misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum (3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tahun 2024 berdasarkan metodologi *Balanced Scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process* dan *Learning and Growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari sebelas sasaran strategi. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan,
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa,
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal,

4. Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien,
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif,
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif,
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional,
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif,
9. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel,
10. Komunikasi Publik yang Efektif, dan
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria IKU didasarkan pada criteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2024 ini terdapat 19 (Sembilan belas) IKU pada level eselon III yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Yogyakarta dengan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 sudah sesuai target yang ditetapkan. Keseluruhan IKU KPKNL Yogyakarta yang terdiri dari 19 IKU berstatus hijau dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 115,33%.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan reviu terhadap kontrak kinerja. Reviu meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja seperti kontrak kinerja tahun sebelumnya, Manual IKU dan *Matriks Cascading*.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih di bawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait terus dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU yang memiliki eksternalitas yang tinggi. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa pengelolaan kinerja tidak hanya menitikberatkan pada hasil capaian semata, tetapi turut memperhatikan kualitas IKU tersebut. Penyelarasan kontrak kinerja dengan Rencana Strategis DJKN tahun 2020-2024, dokumen rencana kerja, dan RKAKL serta pengelolaan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi KPKNL Yogyakarta sehingga mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif terhadap kebutuhan *stakeholder* dan pimpinan serta tentunya tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Yogyakarta dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

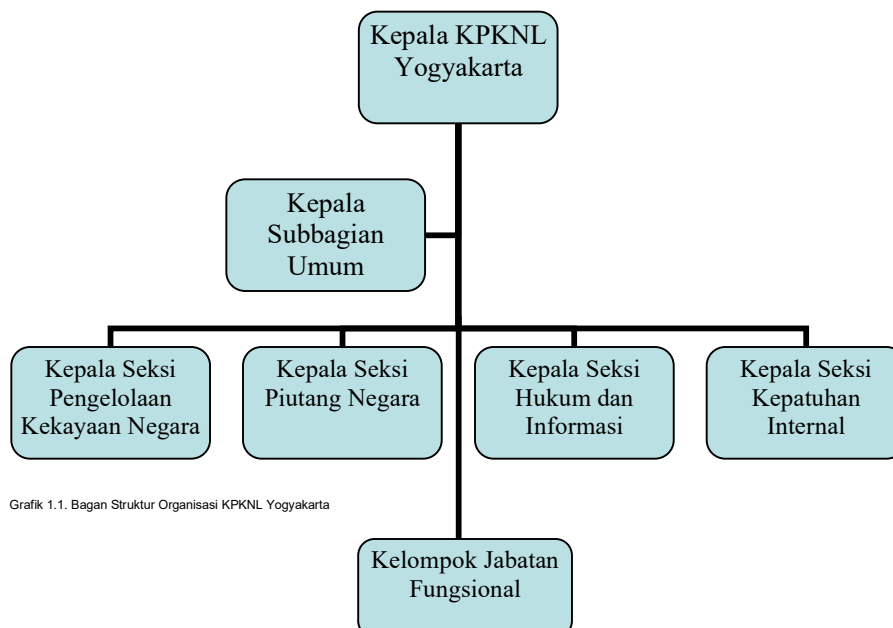
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara,

penilaian, dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Adapun wilayah kerja KPKNL Yogyakarta meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

KPKNL Yogyakarta untuk tahun anggaran 2024 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Grafik 1.1. Bagan Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta

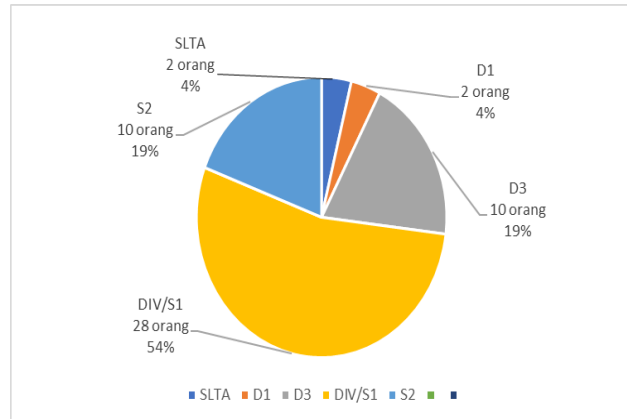
Adapun tugas masing-masing seksi/subbagian di atas adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

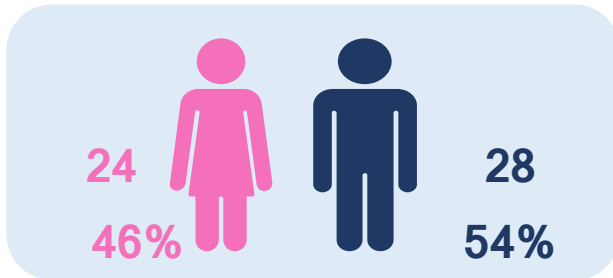
Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Yogyakarta didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur berdasarkan data per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA	2
D1	2
D3	10
D4/S1	28
S2	10
<b>Total</b>	<b>52</b>



**Gambar 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Gambar 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



### Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN memiliki peran dalam pencapaian tujuan diantaranya (1) Penerimaan negara yang optimal dan (2) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. Untuk mencapai hal tersebut, DJKN telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani dengan peran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan PNBPN dari pengelolaan BMN, Piutang, dan Lelang, melakukan evaluasi kinerja BMN, serta mewujudkan implementasi layanan berbasis digital.
2. Mewujudkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mewujudkan penguatan sistem anti korupsi melalui birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.
5. Mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Yogyakarta merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP

sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan berupa penetapan kebijakan dan penyusunan program.

Dokumen Rencana Strategis KPKNL Yogyakarta menjadi pedoman bagi KPKNL Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja. KPKNL Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan di pengelolaan barang milik negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Yogyakarta untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Yogyakarta yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Yogyakarta mempunyai strategi yang akan dijalankan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Sesuai Renstra tahun 2020-2024, strategi KPKNL Yogyakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Lebih Efisien dan Efektif Serta Memberi Manfaat Finansial dan Sosial.

Pengelolaan aset negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan membangun pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta turut berkontribusi dan berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan PNBPN dari hasil pengelolaan aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBPN lelang dan PNBPN pengurusan piutang.
- b. Penggunaan BMN sesuai standar SBSK.
- c. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*the highest and best use principle*).
- d. Pemutakhiran data piutang negara.
- e. Optimalisasi pengurusan piutang negara.
- f. Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan (Portofolio Aset Negara).

2. Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern

3. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Pengukuran deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan,
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan Layanan Publik KPKNL Yogyakarta yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi,

pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah serta komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Pemenuhan unit kerja dengan kriteria ZI menuju WBK/WBBM
- b. Mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara
- b. Mewujudkan basis data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di KPKNL Yogyakarta. Sementara strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata kelola kehumasan pada KPKNL Yogyakarta.

Kondisi sosial masyarakat yang terus berubah menjadi tantangan utama bagi KPKNL Yogyakarta dalam memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi yang terus berjalan membuat KPKNL Yogyakarta dituntut untuk memberikan layanan yang berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan. Hal tersebut telah diantisipasi sehingga tidak menjadi penghalang bagi KPKNL Yogyakarta dalam memperbaiki layanan yang terbaik kepada para *stakeholder*.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Yogyakarta harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Yogyakarta. Sasaran Strategis KPKNL Yogyakarta tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Yogyakarta 2024 memuat 11 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, (3) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal, (4) Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien, (5) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif, (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif, (7) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif, (9) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, (10) Komunikasi Publik yang Efektif, dan (11) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah. Peta Strategi KPKNL Yogyakarta tersaji dalam gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Yogyakarta



Peta Strategi KPKNL Yogyakarta menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholders Perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Yogyakarta mencapai 11 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Keterkaitan antara sasaran strategi dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU

**Sasaran Strategis 1**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1b-CP	Indeks Integritas	Indeks	89,17

**Sasaran Strategis 2**

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	%	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	%	86,5

**Sasaran Strategis 3**

Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

**Sasaran Strategis 4**

Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	Indeks	75

**Sasaran Strategis 5**

Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

**Sasaran Strategis 6**

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	%	67
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	89

**Sasaran Strategis 7**

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	16

**Sasaran Strategis 8**

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	90
8b-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Indeks	85

**Sasaran Strategis 9**

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	%	10
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	%	100

**Sasaran Strategis 10**

Komunikasi Publik yang Efektif

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	80

**Sasaran Strategis 11**

Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	Indeks	82

Terdapat Adendum pada Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 dengan Adendum Perjanjian Kinerja Nomor 05.1A/KN.21/2024 tanggal 31 Mei 2024.

**Evaluasi Kinerja**

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Yogyakarta tahun 2024, KPKNL Yogyakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Polarisasi IKU *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah /kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. Target IKU menantang namun tetap realistis, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*  
**Indeks Capaian =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$**

#### Target

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

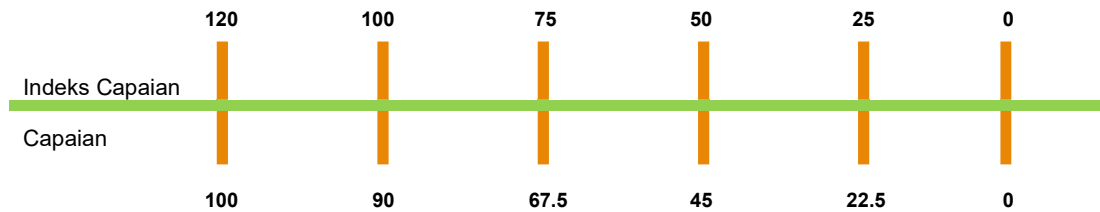
2. Perhitungan untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*  
**Indeks Capaian =  $[1+(1-\text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$**

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*.

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik:



$I_n$  = Indeks capaian

$I_{n-1}$  = Indeks capaian di bawahnya

$I_{n+1}$  = Indeks capaian di atasnya

$C_a$  = Capaian awal

$C_a$  = Realisasi/target x100%

$C_n$  = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana cara maksimum adalah } 200\%$$

b. Apabila Realisasi < Target, maka :

$$C_n = C_a$$

$C_{n-1}$  = Capaian di bawahnya

$C_{n+1}$  = Capaian di atasnya

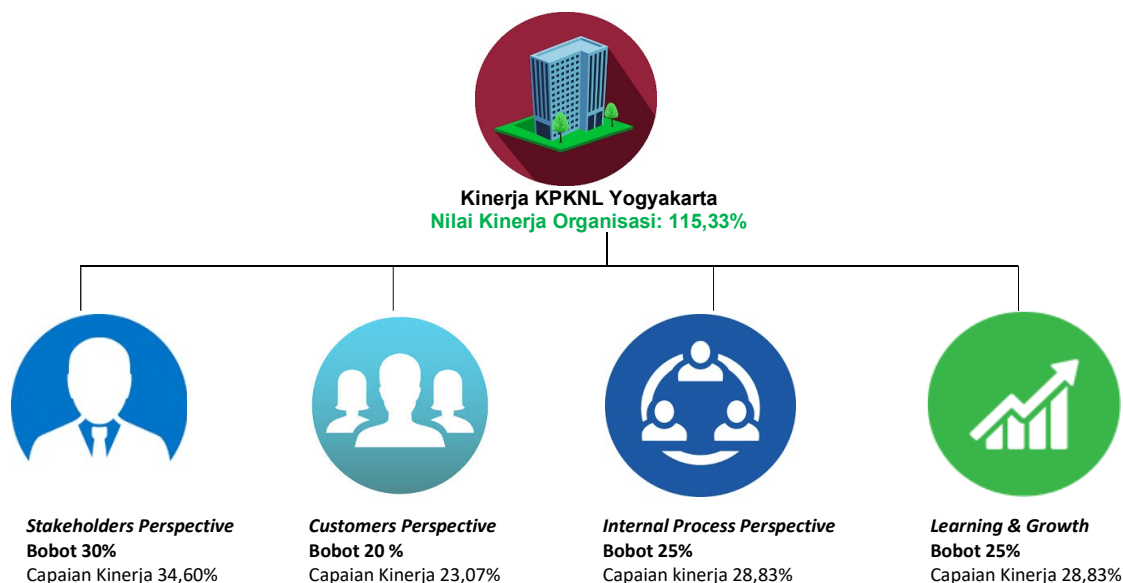
IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Yogyakarta adalah sebesar **115,33**.

Semua capaian IKU KPKNL Yogyakarta berstatus hijau yang berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

#### 1. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp29,086 M)	114,09% (Rp33,184 M)	114,09%
2	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%

#### a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

IKU ini bertujuan untuk menyajikan realisasi atas optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL berasal dari:

##### a. PNBK Kekayaan Negara (PNBP BMN)

Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

##### b. PNBK Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

##### c. PNBK Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) Bea lelang,
- b) Bea lelang pegadaian,
- c) Denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d) Biaya permohonan lelang,
- e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima KPKNL Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar Rp33.184.056.022,00, terdiri atas:

- a. PNBP pengelolaan BMN sebesar Rp26.363.451.050,00
- b. PNBP pelaksanaan lelang sebesar Rp6.802.568.569,00
- c. PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp18.036.403,00

Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang secara keseluruhan telah melebihi target yang berasal dari PNBP pengelolaan BMN, dan PNBP pengurusan piutang negara maupun PNBP pelaksanaan lelang.

IKU ini telah sejalan dengan rencana strategis DJKN Tahun 2020-2024. Dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, DJKN diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan 5 yaitu Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi yang diwujudkan salah satunya melalui penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN dan kinerja BLU serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP.

IKU ini telah sejalan pula dengan target kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berupa penerimaan negara yang optimal dengan sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal. KPKNL Yogyakarta berperan dalam mendukung tercapainya IKU Persentase Realisasi penerimaan negara.

Berikut perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	100%	100%	100%	-	-	85,98%
2021	100%	100%	100%	-	-	111,15%
2022	100%	100%	100%	-	-	177,72%
2023	100%	100%	100%	-	-	134,20%
2024	100%	100%	100%	100%	-	114,09%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang:

Tabel 3.3 Perbandingan capaian dan nilai kerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	174	124,46	124,46	114,82	114,82	114,09	114,09	TLK
Capaian	173,70	124,46	124,46	114,82	114,82	114,09	114,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	114,82	114,82	114,09	114,09	

Capaian keseluruhan ini perlu dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya dengan memperhatikan kendala-kendala yang pernah dihadapi yaitu:

1. Potensi pemanfaatan pada satker masih cukup besar tetapi belum tergali secara optimal (persetujuan pemanfaatan sudah terbit tapi belum ditindaklanjuti/belum terbit perjanjian dan potensi KSP banyak tapi belum diajukan)
2. PNBPN yang masuk selama ini lebih besar dari pemindahtanganan, sementara pemanfaatan hanya dari sewa kantin, ATM yang nilainya relatif kecil.
3. Tingginya Lelang yang TAP disebabkan nilai limit lelang HT terlalu tinggi, objek lelang masih berpenghuni sehingga berpotensi risiko pasca lelang.
4. Terjadinya lelang wanprestasi menghilangkan potensi pencapaian bea lelang.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Menghimpun data PNBPN yang disetorkan oleh bendahara penerimaan.
2. Menghimpun data penerimaan PNBPN dari KPPN.
3. Menghimbau satker agar mengoptimalkan asetnya melalui pemanfaatan BMN.
4. Penagihan Piutang Negara.
5. Sosialisasi *crash program* Piutang Negara.
6. Melakukan penggalan potensi lelang.

7. Melakukan penagihan langsung dan penyampaian Surat Paksa.
8. Memproses BKPN penyerahan baru sampai dengan tahap panggilan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi dan komunikasi secara digital
2. Meningkatkan penggalan potensi Lelang dengan dasar data permohonan lelang yang diajukan oleh *stakeholder*
3. Meningkatkan publikasi di [lelang.go.id](http://lelang.go.id)

#### **b. Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal)

Responden pada penilaian integritas terdiri dari Internal yang berasal dari Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada KPKNL Yogyakarta dan Eksternal yang berasal dari Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan komponen dari masing-masing sumber yaitu:

- Internal
  - Perdagangan Pengaruh;
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Pengelolaan SDM;
  - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
  - Sosialisasi Antikorupsi; dan
  - Transparansi.
- Eksternal
  - Upaya Pencegahan Korupsi;
  - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
  - Integritas Pegawai.

IKU ini sejalan dengan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Adapun target Indeks Integritas DJKN pada tahun 2024 adalah sebesar 92 (skala 100).

IKU ini sejalan dengan target kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berupa pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Adapun target Indeks Integritas Kementerian Keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 92 (skala 100).

Capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2024 yaitu 92,44 dari target 89,17 sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU Indeks Integritas

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	-	90	90	-	-	-
2021	-	90,5	90,5	-	-	-
2022	-	91	91	-	-	-
2023	88,67	91,5	91,5	-	-	89,17
2024	89,17	92	92	92	-	92,44

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Integritas:

Tabel 3.5 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Integritas

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max
Realisasi	-	20	20	42	42	92,44	92,44	TLK
Capaian	-	100	100	140	140	103,67	103,67	
Nilai Kinerja	-	100	100	120	120	103,67	103,67	

Capaian IKU Indeks Kinerja pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

Rencana aksi yang telah dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

- Menyusun matrik *action plan*
- Melakukan sosialisasi anti korupsi
- Penyampaian responden internal dan eksternal
- Melakukan pemenuhan atas dokumen tindak lanjut SPI
- Melakukan sosialisasi /diseminasi anti korupsi

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	89,89%	125,71%
2	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100%	115,61%

### a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

IKU ini menghitung penggunaan BMN yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset negara termasuk *existing* luasan BMN satuan kerja. IKU ini bertujuan untuk optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara.

Target kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 71,5. IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan kekayaan negara yang lebih efektif, efisien dan optimal. Adapun target Indeks Integritas DJKN pada tahun 2024 adalah sebesar 70%.

IKU ini sejalan pula dengan target kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Adapun target kinerja tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Kementerian Keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 70%.

Capaian KPKNL Yogyakarta tahun 2024 yaitu 89,89% dari target 71,5% sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	100%	55%	55%	-	-	100%
2021	62%	57%	57%	-	-	115,37%
2022	65%	60%	60%	-	-	70,44%
2023	68%	65%	65%	-	-	84%
2024	71,5%	70%	70%	70%	-	89,89%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK:

Tabel 3.8 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Tingkat Kesesuaian Pengelolaan BMN dengan SBSK

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	71,5	71,5	Max
Realisasi	-	95,93	95,93	91,82	91,82	89,89	89,89	TLK
Capaian	-	239,83	239,83	153,03	153,03	125,71	125,71	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	120	120	

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan: (1) melakukan pengukuran atas kuantitas terlebih dahulu; (2) melakukan kunjungan lapangan; dan (3) survei lapangan. Adapun permasalahan yang timbul adalah terkait dengan perbedaan struktur organisasi pada Lanud dan AAU.

Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan satker, melakukan penelitian lapangan, pendataan serta koordinasi yang lebih efektif dengan satker, seluruh data yang diperlukan dapat tersedia dengan lengkap dan tepat waktu sehingga seluruh *form* SBSK yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

#### **b. Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, hingga penghapusan aset. Tujuan utama dari pengelolaan BMN adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara secara fisik, legal, dan ekonomis, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan BMN merupakan *core business* dari DJKN. Persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL Yogyakarta meliputi Penetapan Status Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Pemindahtangan BMN, dan Penghapusan BMN. Terhadap persetujuan pengelolaan BMN, Pengguna Barang harus melakukan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh KPKNL Yogyakarta.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui penguatan peran pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang.

IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas

persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024 yang dibuktikan dengan dokumentasi.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Adapun target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset DJKN pada tahun 2024 adalah sebesar 80%.

Capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta yaitu 100% dari target sebesar 86,5% dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebanyak 120 sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	80%	-	70%	-	-	88,24%
2021	85%	-	75%	-	-	103,75%
2022	85%	-	75%	-	-	95,90%
2023	86%	-	80%	-	-	100%
2024	86,5%	-	80%	-	-	100%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN:

Tabel 3.10 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	45	45	60	60	86,5	86,5	Max
Realisasi	-	78,57	78,57	98,33	98,33	100	100	TLK
Capaian	-	174,60	174,60	163,89	163,89	115,61	115,61	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	115,61	115,61	

Capaian IKU Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud

mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan satker atas pelaksanaan tindak lanjut pengelolaan BMN untuk mengatasi masalah kurangnya *awareness* terkait pelaporan tindak lanjut pengelolaan BMN.

Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya antara lain dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan satker atas pelaksanaan tindak lanjut pengelolaan BMN.

### 3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.11.

Tabel 3.11 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	106,71%	106,71%
2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	170,94%	170,94%

#### a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lelang.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat

lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan lelang pegadaian dalam periode tertentu.

Adapun realisasi pokok lelang KPKNL Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp219.815.433.857,00 dari target tahun 2024 sebesar Rp206.000.000.000,00 (106,71%).

Prospek bisnis properti yang kembali meningkat pasca pandemi berdampak signifikan pada capaian kinerja Lelang yang pada tahun ini tercapai dengan optimal. Meskipun realisasi tahun 2024 keseluruhan tercapai, namun realisasi untuk pokok lelang pegadaian hanya tercapai sebesar 94,39% dari target 100%. Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024 ditabulasikan dalam tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja
1.	Pokok Lelang PL I	111.000.000.000,00	130.148.151.757,00	106,71%
2.	Pokok Lelang Pegadaian	95.000.000.000,00	89.667.282.100,00	
Total		206.000.000.000,00	219.815.433.857,00	

KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan target pokok lelang yang optimal melalui penggalian potensi lelang, meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder*, menghimbau pengajuan lelang dengan prioritas laku, sosialisasi lelang kepada *stakeholder* serta koordinasi dengan perum pegadaian. Kegiatan tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai rencana aksi di tahun 2025.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan lelang yang optimal. Adapun target persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang) DJKN pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	100%	-	100%	-	-	45,36%
2021	100%	-	100%	-	-	81,45%

2022	100%	-	100%	-	-	94%
2023	100%	-	100%	-	-	156%
2024	100%	-	100%	-	-	106,71%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang:

Tabel 3.14 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

DJKN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	123,45	112,03	112,03	91,25	91,25	106,71	106,71	TLK
Capaian	123,45	112,03	112,03	91,25	91,25	106,71	106,71	
Nilai Kinerja	120	112,03	112,03	91,25	91,25	106,71	106,71	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain lelang TAP, lelang batal dan lelang tidak ada peminat/penawaran. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pegadaian dan pemohon lelang serta melakukan penggalan potensi lelang. Hal tersebut masih akan dilakukan sebagai rencana aksi tahun 2025.

#### b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Persentase jumlah penurunan *outstanding* piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo piutang negara).

IKU ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)),
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),

3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat),
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal.

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini adalah sebesar Rp2.991.445.178,00 dari target Rp1.750.000.000,00 dengan nilai capaian sebesar 170,94%. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Capaian IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	3%	-	100%	-	-	4,60%
2021	100%	-	100%	-	-	141,57%
2022	100%	-	100%	-	-	264%
2023	100%	-	100%	-	-	168%
2024	100%	-	100%	-	-	170,94%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara:

Tabel 3.16 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

DJKN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	139	217,99	100	125,45	125,45	170,94	170,94	TLK
Capaian	139,38	217,99	217,99	125,45	125,45	170,94	170,94	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

*Action plan* berikutnya adalah melakukan intensifikasi penagihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

#### 4. Pelaksanaan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan penilaian yang *agile*, efektif dan efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan nilai wajar yang cepat dan akurat untuk dapat dijadikan acuan dalam berbagai kebutuhan. Pada sasaran strategis ini, terdapat satu IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian.

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. Dalam sasaran strategis ini, capaian KPKNL Yogyakarta ditabulasikan dalam tabel 3.17.

Tabel 3.17 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	75	-	-	-	-	94,67

Terlampir capaian IKU dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian:

Tabel 3.18 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

DJKN	Pelaksanaan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max
Realisasi	96,86	95,36	95,36	99,38	99,38	94,67	94,67	Avg
Capaian	129,15	127,15	127,15	132,51	132,51	126,23	126,23	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain jumlah permohonan penilaian yang diterima dibandingkan dengan beban kerja penilai. Untuk itu rencana aksi yang akan dilakukan ke depan adalah dengan mengatur kegiatan jadwal survei, melakukan koordinasi dengan pihak Pengelola Barang dan Pengguna Barang terkait jadwal penilaian.

## 5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*),
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating),
- 3). Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum),

- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.19.

Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kekayaan Negara yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	110,46%	110,46%
2	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120%	120%

#### a. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan *output* Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal. Adapun target DJKN atas IKU persentase bidang tanah yang disertipikatkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini adalah 110,46% dari target 100% sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20 Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	100%	-	100%	-	-	111,83%
2021	100%	-	100%	-	-	100,54%
2022	100%	-	100%	-	-	127%
2023	100%	-	100%	-	-	120%
2024	100%	-	100%	-	-	110,46%

Terlampir capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan:

Tabel 3.21 Perbandingan capaian dan nilai kinerja IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	100	100	Max
Realisasi	-	118,39	118,39	149,78	149,78	110,46	110,46	TLK
Capaian	-	295,98	295,98	249,63	249,63	110,46	110,46	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	110,46	110,46	

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

Kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta adalah terkait dengan DIPA sertifikasi BMN. Tindakan yang sudah dilakukan KPKNL mencapai target sertifikasi tahun 2024 adalah melalui rapat koordinasi sertifikasi (Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kanwil BPN, Kantor pertanahan, satker target Sertifikasi), melakukan indentifikasi, dan verifikasi serta *one on one meeting*.

*Action plan* berikutnya adalah akan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan dan satker target sertifikasi untuk pelaksanaan IKU tahun 2025.

#### b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal. Adapun target DJKN atas IKU implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini adalah 120% dari target 100% sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22 Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	100%	-	100%	-	-	100%
2021	100%	-	100%	-	-	120,08%
2022	100%	-	100%	-	-	112,08%
2023	100%	-	100%	-	-	125,36%
2024	100%	-	100%	-	-	120%

Terlampir capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset):

Tabel 3.23 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Implementasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max
Realisasi	19	40,54	40,54	90,65	90,65	120	120	TLK

Capaian	191,30	126,70	126,70	113,32	113,32	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	113,32	113,32	120	120	

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah melaksanakan survei lapangan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan melaksanakan penyusunan rekomendasi pengelolaan aset.

## 6. Persentase Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam capaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.24.

Tabel 3.24 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	42,64%	136,36%
2	Persentase Produktivitas Lelang	89%	117,71%	132,25%

### a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

*Output* Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. BKN Lunas (SPPNL);

2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

IKU ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian saldo BKPN dan validitas data Piutang Negara pada Aplikasi FocusPN serta konsolidasi data penyelesaian piutang dengan kualifikasi macet pada K/L/Pemda yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah dikelola secara optimal.

Pada tahun 2024, target persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara ditetapkan sebesar 67%. Realisasi KPKNL Yogyakarta atas IKU ini adalah sebesar 42,64% sehingga nilai capaian IKU tahun 2024 sebesar 136,36%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada data historis target dan realisasi.

Terlampir capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara:

Tabel 3.25 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

DJKN	Persentase Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	96	90	90	81	81	67	67	Min
Realisasi	95	83,18	83,18	76,28	76,28	42,64	42,64	TLK
Capaian	100,84	107,57	107,57	105,83	105,83	136,36	136,36	
Nilai Kinerja	100,84	107,57	107,57	105,83	105,83	120	120	

#### b. Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Laku per Jenis Lelang}}{\text{Jumlah Lot Lelang per Jenis Lelang}} \times 100\%$$

IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa pengelolaan lelang yang optimal. Adapun target DJKN atas IKU persentase produktivitas lelang pada tahun 2024 adalah sebesar 34%.

Pada tahun 2024, realisasi IKU ini pada KPKNL Yogyakarta adalah 117,71% dari target 89% sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Yogyakarta dengan kinerja sebesar 132,25%. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	34%	-	32%	-	-	36,45%
2021	35%	-	34%	-	-	124,34%
2022	-	-	34%	-	-	-
2023	80%	-	34%	-	-	105%
2024	89%	-	34%	-	-	117,71%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Produktivitas Lelang:

Tabel 3.27 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Produktivitas Lelang

DJKN	Persentase Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max
Realisasi	63	76,48	76,48	93,82	93,82	117,71	117,71	TLK
Capaian	211,33	169,96	169,96	156,37	156,37	132,25	132,25	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta adalah banyak lelang TAP, terutama lelang Hak Tanggungan. Untuk itu telah disusun rencana aksi berupa koordinasi dengan pemenang lelang.

## 7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian ini bertujuan untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam penentuan tarif pemanfaatan dan nilai limit penjualan. IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa penilaian yang berkualitas. Adapun target DJKN atas IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2024 adalah sebesar 26%. Pada tahun 2024, realisasi IKU pada KPKNL Yogyakarta adalah 0% dari target 16% yang menunjukkan bahwa tidak ada deviasi dari hasil penilaian dalam penentuan tarif pemanfaatan dan nilai limit penjualan. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28 Capaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	30%	-	30%	-	-	1,81%
2021	22%	-	29%	-	-	0,26%

2022	-	-	28%	-	-	-
2023	19%	-	27%	-	-	0%
2024	16%	-	26%	-	-	0%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian:

Tabel 3.29 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

DJKN	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta adalah usulan nilai dari satker yang terlalu tinggi di atas nilai wajar yang disebabkan satker belum memahami terkait usulan nilai kaitannya dengan hasil nilai wajar dari penilai. Untuk itu dilakukan rencana aksi berupa koordinasi dengan satker/Pengguna Barang terkait usulan nilai.

## 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kemenkeu satu dapat dimaknai dengan semua pegawai Kementerian Keuangan merupakan satu keluarga, disiapkan ekosistem yang kolaboratif untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi dua IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.30.

Tabel 3.30 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	85	99	116,47%
2	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	117%	130%

#### a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

IKU ini merupakan IKU *Non Cascading*. Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 99 dari target 85. Target dan realisasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31. Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	85	99	116,47%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko:

Tabel 3.32 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max
Realisasi	100	98,10	98,10	98,72	98,72	99	99	TLK
Capaian	117,65	115,41	115,41	116,14	116,14	116,47	116,47	
Nilai Kinerja	117,65	115,41	115,41	116,14	116,14	116,47	116,47	

Rencana aksi KPKNL Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan tepat waktu
- Melaksanakan DKO dan Monev setiap triwulan
- Melakukan pemantauan tindak lanjut rencana aksi setiap triwulan
- Melaksanakan DKI
- Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja
- Menyusun Piagam dan Profil Resiko

#### b. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU persentase pengembangan kompetensi ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi

pegawai berdasarkan usulan *training* berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2024;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Untuk tahun 2024 pegawai KPKNL Yogyakarta yang telah sesuai kriteria sebanyak 52 pegawai dari 52 pegawai yang memenuhi kriteria, artinya seluruh pegawai KPKNL Yogyakarta telah memenuhi standar kompetensi teknis dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

IKU ini merupakan IKU *Non Cascading*. Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 117% dari target 90%. Target dan realisasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33 Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	117%	130%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai:

Tabel 3.34 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	PoI/KP
Target	45	60	60	80	80	90	90	Max
Realisasi	63	94,29	94,29	113,75	113,75	117	117	TLK
Capaian	140,04	157,14	157,14	142,19	142,19	130	130	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan IKU ini adalah dengan melakukan monitoring penyelesaian *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh serta keikutsertaan pegawai dalam webinar.

*Action plan* berikutnya antara lain akan mengikuti program pengembangan pada tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN dan terus melakukan monitoring pelaksanaan diklat tatap muka, *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh.

## 9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Yogyakarta mengidentifikasi tiga IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kinerja Anggaran	100	120	120%
2	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	200%
3	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120%

### a. Indeks Kinerja Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Perhitungan IKU Persentase Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. IKU ini merupakan IKU baru pada KPKNL Yogyakarta.

IKU ini sejalan dengan sasaran strategis DJKN Tahun 2020-2024 berupa organisasi dan SDM yang optimal. Adapun target DJKN atas persentase kinerja anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 95%.

Pada tahun 2024, realisasi IKU pada KPKNL Yogyakarta adalah 120 dari target 100. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36 Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	95	-	95%	-	-	99,96
2021	95,5	-	95%	-	-	98,19
2022	-	-	95%	-	-	-
2023	-	-	95%	-	-	-

2024	100	-	95%	-	-	120
------	-----	---	-----	---	---	-----

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Kinerja Anggaran:

Tabel 3.37 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Kinerja Anggaran

DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	105,06	105,06	120	100	120	120	TLK
Capaian	100	105,06	105,06	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	100	105,06	105,06	120	120	120	120	

Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja anggaran antara lain dengan monitoring realisasi POK, koordinasi dengan UIC, berkoordinasi dengan satker GKN Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

*Action plan* berikutnya antara lain akan memastikan seluruh seksi di lingkup KPKNL Yogyakarta melakukan monitoring secara berkala dan akurat terhadap implementasi penggunaan anggaran serta mendorong setiap seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

#### b. Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP 425785.

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Pada tahun 2024, realisasi IKU pada KPKNL Yogyakarta adalah 0% dari target 10% yang berarti tidak terdapat deviasi data PNBPFungsional DJKN pada KPKNL Yogyakarta. Target dan capaian yang diperoleh KPKNL Yogyakarta sebagaimana terlihat pada tabel 3.38 berikut:

Tabel 3.38 Capaian IKU Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Target Renstra Kemenkeu	Target Renstra DJKN	Target Renja Kemenkeu	Standar Nasional	Realisasi
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	15%	-	-	-	-	0%
2024	10%	-	-	-	-	0%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN:

Tabel 3.39 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN

DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	Min
Realisasi	0	0	10	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	0	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	200	120	120	120	120	

### c. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2024 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni:

#### 1. Proses Pengajuan Sertifikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri:

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target.

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE)

pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

IKU ini merupakan IKU *Non Cascading*. Adapun realisasi IKU ini melampaui target sebesar 120% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 120%. Hal ini dapat dimaknai bahwa kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan pengadaan pada KPKNL Yogyakarta telah berjalan dengan baik.

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan:

Tabel 3.40 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

DJKN	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	-	108	108	120	120	120	120	TLK
Capaian	-	108	108	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	-	108	108	120	120	120	120	

Capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

## 10. Komunikasi Publik yang Efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu. Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan *contact center* dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan *contact center* sesuai dengan *service level agreement* yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu. IKU ini merupakan IKU *Non Cascading*. Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 112 dari target 80. Target dan realisasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.41 berikut:

Tabel 3.41 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112	140%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID):

Tabel 3.42 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

DJKN	Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max
Realisasi	107,83	103,92	103,92	100	80	112	112	Avg
Capaian	134,79	129,89	129,89	125	100	140	140	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	125	120	120	

Kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta antara lain berupa jenis informasi yang perlu ditampilkan di web berubah sehingga mengakibatkan penyediaan informasi menjadi kurang optimal. Untuk itu telah disusun rencana aksi sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY serta Direktorat Hukum dan Humas
- Melakukan pemantauan atas permintaan informasi publik

#### 11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

##### A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

###### 1. Komitmen Pimpinan (7,5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

###### 2. Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI

###### 3. Akses Data dan Informasi (5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

###### 4. Komunikasi (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

##### B. Komponen Proses (25%)

###### 1. Pemilihan Probis yang dipantau (4%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

###### 2. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.

3. Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

4. Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

5. Pelaksanaan Pemantauan (3%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

6. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

7. Pelaporan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

C. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal

2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li

3. Kejadian Tangkap Tangan (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

IKU ini merupakan IKU *Non Cascading*. Capaian KPKNL Yogyakarta yaitu 98,52 dari target 82. Target dan realisasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.43 Capaian IKU Indeks efektivitas UKI

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Efektivitas UKI	82	98,52	120,15%

Berikut capaian dan Nilai Kinerja untuk IKU Indeks Efektivitas UKI:

Tabel 3.44 Perbandingan capaian dan Nilai Kinerja IKU Indeks Efektivitas UKI

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sem I	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	PoI/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max
Realisasi	-	15	15	20	20	98,52	98,52	TLK
Capaian	-	100	100	100	100	120,15	120,15	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	120	120	

Capaian IKU Indeks Efektivitas UKI pada Q1 tidak dihitung karena pada Perjanjian Kinerja awal, IKU dimaksud mulai dihitung pada Q2. Target tersebut diperbarui menjadi triwulanan melalui Addendum Perjanjian Kinerja tanggal 31 Mei 2024.

Rencana aksi yang dilakukan KPKNL Yogyakarta adalah melakukan sosialisasi rencana pemantauan tahun 2025.

Dalam proses pencapaian seluruh sasaran strategis dan IKU organisasi, KPKNL Yogyakarta mendasarkan pada prinsip pendekatan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya sehingga seluruh pegawai dapat berpartisipasi secara aktif dan memiliki peran dalam pencapaian tujuan organisasi.

## KINERJA LAINNYA

Selain 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penghargaan Pelayanan Publik yang Ramah bagi Kelompok Rentan

KPKNL Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pelayanan publik ramah kelompok rentan adalah bentuk pelayanan publik yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada dalam situasi rentan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mendukung kesejahteraan mereka yang berada dalam kondisi rentan, sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan dalam kehidupan sosial maupun layanan pemerintahan.

Penghargaan ini tidak lepas dari upaya dan komitmen KPKNL Yogyakarta untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada Kelompok Rentan. Upaya dan komitmen tersebut diwujudkan dalam inovasi pelayanan, salah satunya “Ater-Ater” yang merupakan inovasi dalam bentuk fasilitas antar jemput khusus bagi Kelompok Rentan yang memerlukan pelayanan di KPKNL Yogyakarta.

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan dan Pemberian Penghargaan



## 2. Pengelolaan Arsip

Tahun 2024 ini, KPKNL Yogyakarta tetap melibatkan semua pegawai untuk berpartisipasi. Pencanangan “GEMATI” atau Gerakan Menata Arsip dengan Hati yang sudah dicanangkan sejak tahun 2022 menjadi awal pembenahan arsip pada KPKNL Yogyakarta. “GEMATI” merupakan kegiatan pemberkasan arsip yang dilakukan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pegawai KPKNL Yogyakarta. Kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode klasifikasi, pelabelan, pembuatan daftar arsip, dan penyimpanan.

## 3. *Crash Program* Keringanan Utang

*Crash Program* Keringanan Utang merupakan program percepatan penyelesaian Piutang Negara dan/atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan

utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya atau beban lain.

*Crash Program* Keringanan Utang dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2024.

#### 4. Kehumasan

Kehumasan menjadi bagian penting bagi suatu organisasi sebagai upaya komunikasi publik dengan para pemangku layanan atas layanan yang diberikan. Sebagai instansi pemerintahan yang membutuhkan sarana/fasilitas untuk menyampaikan layanan-layanan sesuai tugas fungsi KPKNL Yogyakarta yang dapat digunakan oleh masyarakat, kehumasan menjadi jembatannya.

Bentuk kehumasan yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta, yaitu pengelolaan media sosial, penulisan berita liputan/artikel, penyusunan profil kantor, hubungan media massa, penyampaian informasi lewat iklan radio/surat kabar/situs internet, dan lainnya.

Berbagai bentuk kehumasan tersebut senantiasa dilaksanakan sebagai upaya menjaga citra baik dan reputasi KPKNL Yogyakarta dan memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat secara umum.

#### 5. Perbaikan Pelayanan

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju organisasi.

Transformasi digital lebih luas tidak hanya dari merubah layanan menjadi *online* namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Menjawab kebutuhan tersebut, KPKNL Yogyakarta memiliki inovasi layanan di antaranya berupa *One Stop Service* yang merupakan aplikasi layanan lelang satu pintu yang dapat diakses oleh

*stakeholder* dan Aplikasi PaiJo (Panggonan Idola Kerjo) merupakan aplikasi untuk menjangkau preferensi unit kerja internal bagi pegawai KPKNL Yogyakarta.

### REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp2.365.351.026,00 atau 92,40% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.559.830.000,00. Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.45 Realisasi per jenis belanja KPKNL Yogyakarta Tahun anggaran 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan
Belanja Barang	Rp2.343.551.000,00	Rp2.156.940.326,00	92,04%
Belanja Modal	Rp216.279.000,00	Rp208.410.700,00	96,36%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp2.559.830.000,00</b>	<b>Rp2.365.351.026,00</b>	<b>92,40%</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Yogyakarta Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Sebagai pengelola kekayaan negara, dan lelang, KPKNL Yogyakarta telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Seluruh jajaran KPKNL Yogyakarta senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Hal ini tampak pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Yogyakarta tahun 2024 sebesar 115,33%.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan PNBP dari hasil pengelolaan Aset melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, PNBP lelang dan PNBP pengurusan piutang
2. Memastikan aset yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta aman secara fisik, administrasi, dan hukum
3. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Satker.
4. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara.
5. Melakukan inovasi dan mengembangkan lelang.
6. Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dengan mengembangkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan layanan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Yogyakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dalam lingkup internal, Laporan Kinerja tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam lingkup eksternal, Laporan Kinerja menjadi media pengenalan kepada

*stakeholders* sehingga diharapkan peran KPKNL Yogyakarta dapat semakin dirasakan oleh masyarakat melalui pemberian layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor KPKNL Yogyakarta Tahun 2024
2. Ceklist IKU KPKNL Yogyakarta Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-05.1/KN.21/2024**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**YOGYAKARTA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
YOGYAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp25.77 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp177,05 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp1,70 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67 (221 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

**Program**

**Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko** Rp 452.032.000,00

**Kegiatan :**

- 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp 15.620.000,00
- 2. Pengelolaan Aset Rp 436.412.000,00

**Program :**

**Dukungan Manajemen** Rp 2.048.065.000.00

- 3. Legislasi dan Litigasi Rp 55.112.000,00
- 4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp 1.921.611.000,00
- 5. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp 54.802.000,00
- 6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp 16.540.000,00

Semarang, 20 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tuti Kurniyansih



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
YOGYAKARTA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b>							
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal</b>							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif</b>							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif</b>							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	67%	67%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel</b>							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
10	<b>Komunikasi publik yang efektif</b>							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	<b>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</b>							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Semarang, 20 Februari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Yogyakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tuti Kurniyarningsih



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 20 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Tuti Kurniyaningsih	NAMA	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	
NIP	197509231995032001	NIP	196503041991032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan



		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	67%	Proses Bisnis



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)			
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses Bisnis
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal dan Anggaran
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	Penguatan Internal dan Anggaran
10.	Komunikasi publik yang efektif  (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal dan Anggaran



11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal dan Anggaran
----	---	------------------------	----	---------------------------------

## B. TAMBAHAN

### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan</p>



PERILAKU KERJA

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Semarang, 20 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tuti Kurniyaningsih  
197509231995032001



Ditandatangani secara elektronik

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani  
196503041991032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 20 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	. 50 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
5	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	67%	67%
11	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
17	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82



KONSEKUENSI

- |    |  |
|----|--|
| 1. | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>                     |
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |

Semarang, 20 Februari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tuti Kurniyaningsih  
197509231995032001



Ditandatangani secara elektronik

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani  
196503041991032001



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 05.1A/KN.21/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-05.1/KN.21/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100

### B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2			s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y		
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	100	100	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	40	40	60	60	100	100	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	20	40	40	60	60	100	100

2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	100	100	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Semarang, 31 Mei 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan  
D.I.Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik  
Tuti Kurniyaningsih



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tanggal 20 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal dan Anggaran
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal dan Anggaran

### B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No	Indikator Kinerja Individu	Target							No	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	100	100	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17



19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
----	------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Semarang, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tuti Kurniyansih



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani



### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

#### SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

##### 1a – CP Persentase Pealisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

#### SS.1 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

##### 1b – CP Indeks Integritas

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a – CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2b – CP Persentase Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal		
3a – CP Persentase Realisasi Pokok Lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.3 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal		
3b – CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.4 Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien		
4a – CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
5a – CP Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.5 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		
5b – CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.6 Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
6a – CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.6 Pelaksanaan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
6b – CP Persentase Produktivitas Lelang		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.7 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
7a – CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
8a – N Persentase pengembangan kompetensi pegawai		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
8b – N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel		
9a – CP Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

#### SS.79 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

#### 9b – CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel		
9c – N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.10 Komunikasi Publik yang Efektif		
10a – N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√

### Checklist Kelengkapan Narasi IKU

SS.11 Pengawasan dan Pengendalian internal yang Bernilai Tambah		
11a – N Indeks Efektivitas UKI		
No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (capaian tanpa batas)	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;</li> <li>• target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi</li> <li>• target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024</li> <li>• Standar Nasional (jika ada)</li> </ul>	√
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√

11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√
13	Narasi Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	√



# **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**Gedung Keuangan Negara**

**Jalan Kusumanegara Nomor 11 Semaki, Kecamatan**

**Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta**

**Telp : (0274) 544091**

**Wa : 08112958564**